

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BPJS PADA LAPORAN
KEUANGAN PUSKESMAS LEMBANG MAJENE**

(Studi Kasus Puskesmas Lembang Majene, Kabupaten Majene)

***ANALYSIS OF BPJS FUND MANAGEMENT IN LEMBANG MAJENE
PUSKESMAS FINANCIAL REPORTS***

(Case Study of Lembang Majene Community Health Center, Majene Regency)



SUKMAWATI

C02 18 041

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BPJS PADA
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS
LEMBANG MAJENE**
(Studi Kasus Puskesmas Lembang Majene, Kabupaten Majene)



SUKMAWATI

C02 18 041

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Sitti Hadijah, S.Pd. M.Ak
NIP : 19840425 201504 2001

Pembimbing II


Muhammad Ihsan Ansari, SE, M.Ak
NIP : 199006212022031002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi


Nuraeni, M. S.Pd., M.Ak
NIP : 19631203 201902 2

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BPJS PADA
LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS
LEMBANG MAJENE**
(Studi Kasus Puskesmas Lembang Majene, Kabupaten Majene)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
SUKMAWATI

C02 18 041

Telah diuji dan diterima panitia ujian
pada Tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

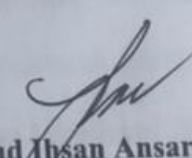
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S. Pd, M.Ak	Ketua	1)
2. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Sekretaris	2)
3. Jumardi, S.E., M.Si	Anggota	3)
4. Taufik Hidayat B, Tahawa, S.E., M.Ak.	Anggota	4)
5. Sufyan Amirullah, SE.,M.Ak	Anggota	5)

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Hadijah, S.Pd. M.Ak
NIP :19840425 201504 2001


Muhammad Ihsan Ansari, SE,M.Ak
NIP :199006212022031002

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radjab, M. AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

SUKMAWATI, Analisis Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan Puskesmas Lembang Majene (Studi Kasus Puskesmas Lembang Majene, Kabupaten Majene), Di bimbing oleh Ibu Sitti Hadijah,,S.Pd. M.Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Ihsan Ansari,S.E,M.Ak Sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan dana BPJS pada laporan keuangan di Puskesmas Lembang Majene. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah salah satu pegawai puskesmas lembang Kabupaten Majene. Hasil dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana BPJS Pada laporan keuangan melalui beberapa tahapan dan proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada pengelolaan dana BPJS pada laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tentu dengan perencanaan yang dibuat dari awal serta dilaksanakan dan diawasi oleh pihak puskesmas maupun pihak dinas kesehatan.

Kata kunci: BPJS, dan Laporan keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah melakukan upaya agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak melalui sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pemerintah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengupayakan melalui program jaminan kesehatan nasional dan program ini diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini setiap orang tidak dapat terhindar dari yang namanya risiko baik itu hal yang menyangkut dengan harta kekayaan maupun risiko terhadap jiwa dan kesehatan.

Setiap orang pasti akan mengalami sakit walaupun tidak mengetahui kapan akan sakit, risiko tersebut ada saja yang dapat diperkirakan seperti sakit, kecelakaan. Cacat atau meninggal dunia. Dengan adanya risiko tersebut. Pemerintah dapat menimbulkan biaya yang cukup besar untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah menganggap bahwa perlu adanya penyusunan sistem dan program jaminan sosial. Program ini akan digunakan sebagai perlindungan

bagi seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan dikarenakan pengganguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua atau meninggal dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama pegawai negeri sipil, penerimaan pensiun PNS dan TNI/POLRI dan rakyat biasa. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan satu-satunya program pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat Indonesia dan juga merupakan badan milik usaha. Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk mengawasi keluhan-keluhan kesehatan masyarakat Indonesia BPJS kesehatan melayani proses pengobatan dan memberikan keringanan dalam hal pembiayaan fasilitas kesehatan. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah risiko atau peristiwa yang terjadi dimasa yang akan datang.

Puskesmas adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia utamanya dalam era jaminan kesehatan nasional, keberhasilan pelayanan kesehatan melalui puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan. Manajemen merupakan salah satu sasaran yang harus diperbaiki oleh seorang akuntan dalam pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan agar dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam pengendalian kegiatan perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan sering menjadi kendala karena sulit untuk dipahami dan kurangnya keterbukaan terdapat kesalahan

atau kecurahan dalam pengelolaan dana BPJS karena hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses dan mengetahui laporan keuangan. Dan masih banyak pihak eksternal dari puskesmas yang belum mengetahui seperti apa pihak puskesmas dalam mengelolah dana BPJS.

Menurut Iskandar (2020). Pada Pasal 14 Undang-Undang BPJS kesehatan bagi warga negara Indonesia diwajibkan mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan bagi warga negara asing yang sudah tinggal selama enam bulan di Indonesia juga wajib mendaftar menjadi peserta BPJS kesehatan hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang. Peserta pada BPJS kesehatan memiliki dua golongan yang pertama peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau yang disebut peserta non mandiri sedangkan dengan golongan kedua yaitu peserta non penerima bantuan iuran (non PBI) atau yang disebut peserta mandiri hal ini tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 Tentang jaminan kesehatan PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2021 Tentang pencatatan pengesahan dana kapitalisn jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerja Puskesmas adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, utamanya dalam era Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN). Keberhasilan

pelayanan kesehatan melalui Puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan.

Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dimana puskesmas merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba atau nonprofit. Puskesmas memperoleh dana dari BPJS kesehatan dalam bentuk dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Dana kapitasi JKN merupakan dana yang dibayarkan secara berkala oleh BPJS kesehatan kepada puskesmas yang merupakan penyelenggara kesehatan atau sebagai salah satu fasilitas bagi peserta JKN. Dan sumber dana kapitasi sendiri berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN. Pembayaran dana kapitasi JKN dilakukan di setiap bulan tanpa memperhitungkan banyaknya pasien peserta JKN yang berobat dan jenis pelayanan kesehatan kepada pasien peserta program JKN. Bagi puskesmas ini artinya setiap bulan mereka akan mendapatkan transfer dana yang dalam setahun jumlahnya sangat besar dimana dana tersebut merupakan hak puskesmas dan secara regulasi diberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Berikut ini data realisasi puskesmas lembang 2022:

Tabel 1.1 Realisasi Puskesmas Lembang-2022

Periode bulan Jan-Des 2022		
pendapatan :	Kapitasi BPJS	Rp. 995.689.800.00
	Non kapitasi BPJS	Rp.162.030.000.00
Total pendapatan Rp.1.157.719.800.00		
Belanja:	Belanja Pengawai kapitasi BPJS	Rp.688.840.392.00
	Belanja Pengawai Non kapitasi BPJS	Rp.92.211.000.00
Total pengeluaran Rp.781.351.392.00		

Sumber : Laporan Keuangan Puskesmas Lembang

Berbagai masalah yang terjadi di internal puskesmas lembang pada observasi awal permasalahan yang muncul adalah kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan belum mudah untuk dipahami, selain itu masih terdapat kesalahan dalam pengimputan data pada program yang sudah disediakan. Puskesmas Lembang masih kurangnya transparansi, terkadang pihak puskesmas dirugikan dengan dana yang harus diganti akibat dari kesalahan dan kecurangan pencatatan dana BPJS karena hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui dan dapat mengakses laporan keuangan, selain itu masih sulit untuk memahami isi dari laporan keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki oleh seorang akuntan dalam pembuatan dan pengelolaan. Laporan keuangan, agar dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam pengendalian kegiatan perusahaan/organisasi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lembang karena aliran dana kapitasi perlu dianalisis, dana kapitasi yang masuk jika ada peserta yang menunggak dalam pembayarannya, dana tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan perbulannya. Hal ini memungkinkan adanya penyalagunaan dana kapitalisasi tersebut yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Puskesmas Lembang menunjukkan bahwa masih kurangnya pengelolaan dana kapitasi yang diperuntukan sebagai jaminan kesehatan di puskesmas yang mengakibatkan pengelolaan dana yang banyak terpakai. Pengelolaan dana kapitasi merupakan suatu strategi untuk menyusun, melaksanakan, mencatat dan mengumumkan yang diperbolehkan oleh setiap FKTP BPJS Kesehatan. Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan dan mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan Puskesmas Lembang Majene”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah menganalisis Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan Puskesmas Lembang Majene.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan Puskesmas Lembang Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang cara menganalisis Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan Puskesmas Lembang Majene. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran, keilmuan dan wawasan mengenai menganalisis Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan.

2. Bagi Puskesmas Lembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Puskesmas Lembang untuk lebih memperhatikan Pengelolaan Dana BPJS Pada Laporan Keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menjadi bahan masukan dalam karya ilmiah yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Kesehatan

Menurut Darma (2019), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Organisasi kesehatan menggunakan beberapa parameter sebagai ukuran keberhasilannya antara lain, jumlah orang yang dilayani dan biaya *overhead* yang mampu diminimaliskan.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) merupakan mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Akuntansi sektor publik memiliki ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen yang berada di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, maupun organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016). Dengan demikian, praktik-praktik sektor publik adalah sama dengan publik praktik akuntansi pada umumnya, hanya terdapat batasan pada pemangku kepentingannya yang merupakan pihak yang berasal dari pemerintahan dan masyarakat luas. Menurut Darma (2019), akuntansi kesehatan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana. Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang

sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya.

Akuntansi kesehatan merupakan salah satu keahlian yang bertujuan untuk memberikan kerangka dasar bagi mahasiswa yang ingin berkarir sebagai praktisi akuntansi di lembaga atau organisasi-organisasi kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, ataupun akademisi dalam mengembangkan ilmu akuntansi kesehatan.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Menurut Firdausa (2020) pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan serta penyelenggaraan, pengurusan atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggungjawab tersebut secara kolektif sering di sebut sebagai fungsi manajemen.

2.1.2.1 Fungsi Pengelolaan

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dilakukan sebagai suatu proses (aktifitas) penentuan dan pencapaian suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan atau organisasi menggunakan fungsi dasar pelaksanaan yang terdiri dari: *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan) yaitu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah di rumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
3. *Actuating* (Pengarahan) yaitu berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan lainnya.
4. *Controlling* (Pengendalian/Pengawasan) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

2.1.2.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar sumber daya yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sasaran dapat digerakkan sedemikian rupa, agar dapat menghindar dari pemborosan waktu, tenaga dan materi dalam mencapai suatu tujuan yang inginkan. Semua perusahaan atau organisasi membutuhkan yang namanya pengelolaan, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi berdasarkan visi dan misi.

2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas kerja suatu perusahaan atau organisasi.
4. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat.

Menurut Afifiddin (2010) bahwa langka-langka pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi.
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. Menentukan standar kerja (efektivitas dan efisiensi).
5. Menentukan ukuran untuk menilai.
6. Mengadakan pertemuan.
7. Pelaksanaan.
8. Pengadaan penilaian.
9. Mengadakan *review* secara berkala.
10. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.1.3 Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Didalam program BPJS jaminan sosial jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraannya dibuat dalam 2 program penyelenggaraan yaitu:

1. Program yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan programnya adalah jaminan kesehatan yang berlaku mulai dari tanggal 1 januari 2014.
2. Program yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan, dan programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang direncanakan mulai pada 1 juli 2015.

2.1.3.1 Manfaat BPJS Kesehatan

Manfaat adanya BPJS kesehatan dapat membantu masyarakat karena iuran yang ditetapkan sangat terjangkau dan dapat memilih sesuai kondisi ekonomi. Manfaat lain kepesertaan BPJS yaitu:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan non spesialisik terdiri dari:
 - a. Administrasi pelayanan,.
 - b. Pelayanan promotif dan preventif.
 - c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.
 - d. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis.

- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
 - f. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.
 - g. Indak medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif.
 - h. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama.
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi:
- a. Rawat jalan, terdiri dari: Administrasi pelayanan, Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, rehabilitasi medis, pelayanan alat kesehatan, pelayanan kedokteran dan pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
 - b. Rawat inap, terdiri dari: perawatan inap diruang intensif dan perawatan inap non intensif.

2.1.3.2 Dana Kapitasi JKN

Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang diterima puskesmas dari BPJS kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS kesehatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Perpres 32 Tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pernyataan ini sama dengan istilah “tarif Kapitasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Nasional. BPJS kesehatan dan Dinas kesehatan menentukan tarif kapitasi untuk setiap Puskesmas melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan berdasarkan peraturan BPJS kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Melalui dana kapitasi dari puskesmas inilah, Pemerintah daerah memperoleh dana untuk pelayanan kesehatan kepada pasien peserta program JKN.

Berdasarkan peraturan BPJS kesehatan tersebut, besaran tarif kapitasi puskesmas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di sebut sebagai norma. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran tarif kapitasi bagi puskesmas adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) SDM meliputi ketersediaan dokter berdasarkan rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta yang terdaftar dan ketersediaan dokter gigi, perawat, bidan termasuk jejaringan bidan dan tenaga administrasi.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana Pertimbangan kelengkapan sarana dan prasarana meliputi kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memberikan pelayanan dan waktu pelayanan di puskesmas.
3. Lingkup pelayanan Lingkup pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan, pelayanan obat, dan pelayanan laboratorium tingkat pertama.
4. Komitmen pelayanan Komitmen pelayanan merupakan komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk meningkatkan mutu pelayanan

melalui pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN di puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN menerapkan azas umum pelaksanaan APBD dan normanorma penatausahaan keuangan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah mengalami perubahan dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan (*financial statement*) akan menjadi lebih manfaat untuk mengambil keputusan, apabila informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang di sajikan maka akan semakin yakin pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih jauh keyakinan bahwa perusahaan diprediksi akan tumbuh memperoleh keuantungan yang berkelanjutan, yang optimis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dengan berbagai urusan dengan perusahaan.

Menurut Hery (2016), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan. Menurut Fahmi (2014), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi yang menggunakan teknik serta prosedur tertentu yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap prestasi perusahaan yang meliputi, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terjadi selama satu buku yang bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahun yang mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kalender.

Selain tahun kalender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari. Istilah periode akuntansi sering juga di ganti dengan tahun buku. Walaupun periode akuntansi tahun buku yang digunakan itu adalah tahunan, manajemen mesin dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek.

2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013) tujuan laporan keuangan adalah :

1. *Screening*, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi kerusakan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan
2. *Understanding*, memahami perusahaan , kondisi keuangan dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.
4. *Diagnosis*, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation*, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Fahmi (2011), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang bekepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

2.1.4.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Menurut Prastowo (2015), laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode adalah :

1. Laporan Posisi Keuangan Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan pada saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.
4. Laporan Arus Kas menunjukkan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan keuangan secara terpisah selama satu periode tertentu.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu berhubungan dengan analisis risiko maupun strategi mitigasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

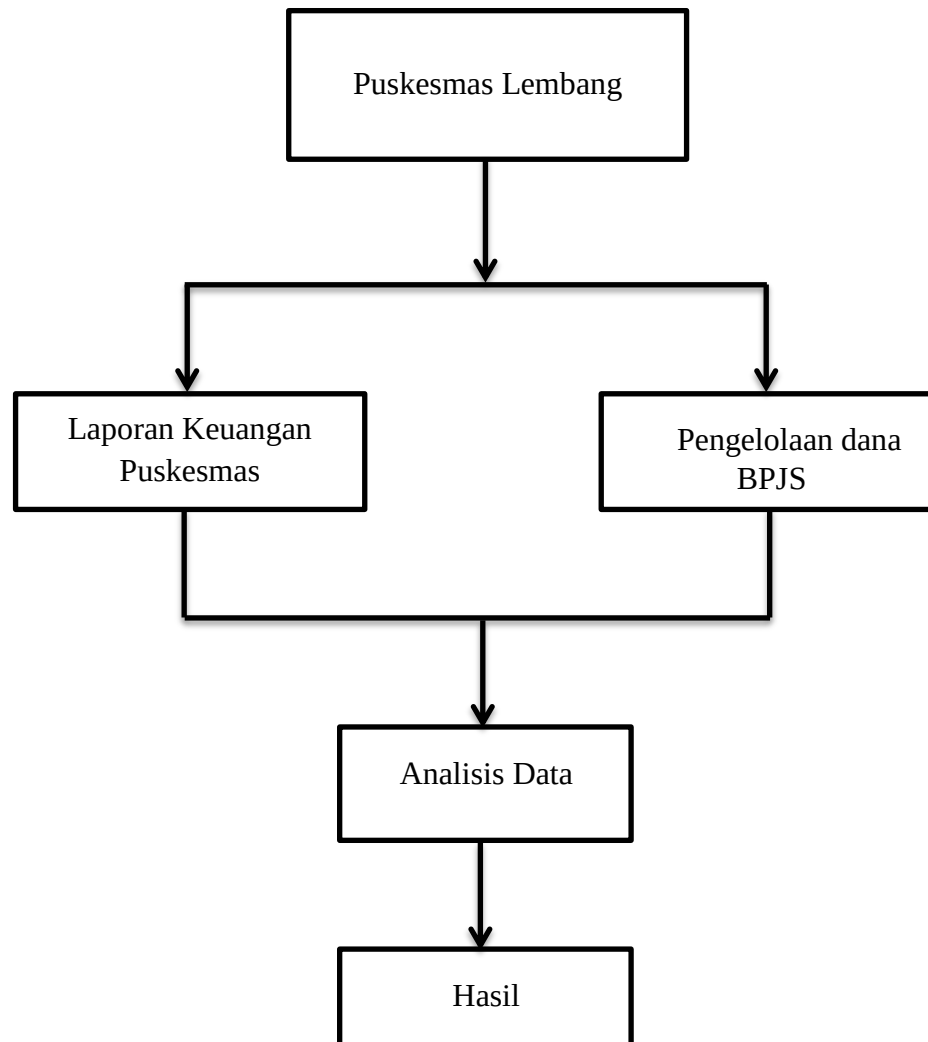
No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sholihin (2016). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan.	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Di Puskesmas Watubangga Kecamatan Watubangga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran dana kapitasi di puskesmas watubangga sepenuhnya digunakan untuk membayar jasa pelayanan yang dilakukan di puskesmas	Sama-sama membahas pengelolaan dana kapitasi BPJS kesehatan di puskesmas dan metode penelitian	Tempat penelitian dan variabel penelitian

		Kabupaten Kolaka Tahun 2015	berdasarkan akumulasi poin tingkat pendidikan, hari kerja, hari efektif dan masa kerja.	kualitatif	
2.	Essy Desmita. (2022). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKM) FKTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keuangan daerah menghambat pengelolaan dana kapital FKTP di puskesmas khususnya puskesmas yang belum blud, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk menyusun, penganggaran dan pengelolaan dana kapitasi.	Sama-sama membahas pengelolaan dana kapitasi kesehatan di puskesmas dan metode penelitian kualitatif	Perbedaan mengenai pengelolaan dana badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dalam fktk.
3.	Hasmawati. (2018). Jurnal Katalogis.	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Studi Pada Puskesmas Paragi Kabupaten Parigi Moutong)	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa penggaran dana puskesmas paragi menggunakan peraturan bupati sebagai dasar penyusunannya. Puskesmas hanya melakukan perencanaan belanja, sedangkan perencanaan pendapatan dilakukan oleh dinas kesehatan.	Sama-sama membahas pengelolaan tentang BPJS di puskesmas dan metode penelitian kualitatif	Terdapat perbedaan variabel pemanfaatan dan juga perbedaan tempat penelitian.
4.	Imanuel (2016). Jurnal Riset Akuntansi Dan	Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi	Hasil penelitian menunjukan penganggaran dana kapitasi jkn oleh FKTP	Persamaan variabel pengelolaan dana dan	Perbedaan pengelolaan dana kapitasi

	Auditing.	JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung	dilakukan dan tersentralisasi di dinas kesehatan sementara. Sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan fktpt pada masyarakat .	metode penelitian kualitatif	JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di kota bitung
5.	Sari (2017). Jurnal Bisnis Dan Manajemen.	Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Di Kabupaten Bondowoso	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ada kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam teknis pengelolaan dana kapitasi jkn puskesmas, adanya monitoring dan evaluasi internal, dan adanya peningkatan kompetensi dalam hal pengelolaan dana kapitasi jkn melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	Persamaan variabel pengelolaan dana pada puskesmas dan metode penelitian kualitatif,	Perbedaan pada strategi optimalisasi pengelolaan dana.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Lembang Majene. Penelitian ini menjelaskan tentang laporan keuangan Puskesmas dan pengelolaan dana BPJS pada laporan keuangan lalu di analisis sesuai dengan teknik analisis data kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

DAFTAR PUSTAKA

- Afifiddin, (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabet.
Depkes RI., *Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan*. 2009.
- Desmita, E. (2022). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKM) FKTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Vol 15, No 1*.
- Firdausa J. (2020). *Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Di BMW Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan Kesatu. Alfabeta: Bandung.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal*. edisi pertama. Mitra wacana media. Jakarta.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2013). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Edisi pertama. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Hasmawati Hi. Harbing, (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pda Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (Study Pada PUSKESMAS Paragi Kabupaten Paragi Moutong)*.
- Hery. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Edisi pertama. PT. Grasindo. Jakarta
- Immanuel Christian Undap, Lintje Kalangi, dan Hendrik Manossoh, (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi
- Munawir. S. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi empat. Liberty. Yogyakarta.
- Permendekri No.13 Tahun (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007*.
- Permenkes RI, (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Prastowo, D. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. Edisi kedua. Cetakan kedelapan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

Sari. (2017). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.

Sholihin, Sakka dan Parida, (2016). *Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan di PUSKESMAS Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Tahun 2015*.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Program Kesehatan.